



Sistem Manajemen Pembiayaan Pendidikan, Partisipasi Masyarakat, Kepemimpinan, dan Mutu Sekolah Dasar

Teguh Triwiyanto^{1*}, Ahmad Nurabadi², R. Bambang Sumarsono³, Desi Eri Kusumaningrum⁴, Muh. Arafik⁵, Pramono⁶ 

^{1,2,3,4}Departemen Administrasi Pendidikan, Universitas Negeri Malang, Indonesia

⁵Departemen PGSD, Universitas Negeri Malang, Indonesia

⁶Departemen PGPAUD, Universitas Negeri Malang, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received November 28, 2022

Revised November 29, 2022

Accepted March 12, 2023

Available online April 25, 2023

Kata Kunci:

Sistem Manajemen Pembiayaan Pendidikan, Partisipasi masyarakat, Kepemimpinan, Mutu Sekolah Dasar.

Keywords:

Educational Financing Management System, Community Participation, Leadership, Elementary School Quality



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

ABSTRAK

Penelitian dapat membantu mengidentifikasi masalah sistem manajemen pembiayaan pendidikan, partisipasi masyarakat, kepemimpinan, dan mutu sekolah dasar dan memberikan solusi yang lebih baik. Penelitian juga dapat membantu memahami faktor-faktor yang memengaruhi masalah sistem manajemen pembiayaan pendidikan, partisipasi masyarakat, kepemimpinan, dan mutu sekolah dasar. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh sistem manajemen pembiayaan pendidikan, partisipasi masyarakat, kepemimpinan, terhadap mutu sekolah dasar. Jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan *ex-post facto*. Subjek penelitian yaitu kepala sekolah. Sampel penelitian diambil secara nonprobabilitas jenis sampel tepat, pada sekolah dasar dengan kriteria jumlah siswa di atas 400. Berdasarkan kriteria jumlah siswa tersebut, diambil 23 sekolah yang berasal dari 11 kecamatan. Pengambilan data dengan teknik observasi, diukur, dan mengekspresikan angka. Analisis data deskriptif, kemudian dilakukan uji statistik T dan F. Hasil penelitian menunjukkan, secara simultan terdapat pengaruh sistem manajemen pembiayaan pendidikan, partisipasi masyarakat, dan kepemimpinan kepala sekolah terhadap mutu sekolah dasar. Implikasinya, perlu kolaborasi sekolah dan masyarakat, sebagai bagian sistem manajemen pembiayaan pendidikan yang berasal dari orang tua siswa. Untuk meningkatkan mutu sekolah, kepemimpinan kepala sekolah perlu berupaya mendorong layanan sekolah sesuai atau melebihi standar yang berlaku.

ABSTRACT

Research can help identify problems with education financing management systems, community participation, leadership, and quality of primary schools and provide better solutions. Research can also help understand the factors that influence issues of education financing management systems, community participation, leadership, and the quality of primary schools. The aim of the study was to determine the effect of the education financing management system, community participation, leadership on the quality of elementary schools. This type of quantitative research with an *ex-post facto* approach. The research subject is the school principal. The research sample was taken non-probably with the right sample type, in elementary schools with the criterion for the number of students above 400. Based on the criterion for the number of students, 23 schools were taken from 11 sub-districts. Retrieval of data with observation techniques, measured, and express numbers. Analysis of descriptive data was then carried out by statistical tests T and F. The results showed that there was a simultaneous influence of the education financing management system, community participation, and school principal leadership on the quality of elementary schools. The implication is that school and community collaboration is needed, as part of the education financing management system that comes from parents of students. To improve school quality, school principal leadership needs to strive to encourage school services to meet or exceed applicable standards.

*Corresponding author.

E-mail addresses: teguh.triwiyanto.fip@um.ac.id (Teguh Triwiyanto)

1. PENDAHULUAN

Mutu sekolah dasar merupakan proses pematangan mutu siswa yang dikembangkan dengan cara membebaskan siswa dari ketidaktahuan, ketidakmampuan, ketidakberdayaan, ketidakbenaran, ketidakjujuran, dan dari buruknya akhlaq dan keimanan. Mutu pendidikan ditentukan berdasarkan pertimbangan (kriteria) intrinsik dan ekstrinsik. Berdasarkan kriteria intrinsik, mutu merupakan produk pendidikan yakni manusia yang terdidik, sesuai dengan standar ideal. Berdasarkan kriteria ekstrinsik, pendidikan merupakan instrumen untuk mendidik tenaga kerja yang terlatih. Mutu sekolah dapat diukur melalui empat elemen (Rodríguez, Rodado, Crissien Borrero, & Parody, 2022). Elemen pertama yaitu kemajuan, yang mengukur peningkatan sekolah terkait ujian standar nasional untuk siswa sekolah. Berikutnya efisiensi, yang memperhitungkan proporsi siswa yang naik ke tahun ajaran berikutnya. Elemen ketiga yaitu kinerja, yang memungkinkan membandingkan peringkat sekolah-sekolah tersebut dari yang lain. Elemen terakhir yang dipertimbangkan dalam indeks yaitu lingkungan sekolah, yang meninjau konteks di mana siswa mengambil lokasi belajar mereka, berdasarkan survei yang dilakukan di sekolah. Mutu sekolah yang baik tidak bisa dilepaskan dari kemungkinan tercapainya tujuan pendidikan, yang didukung oleh pembiayaan, partisipasi masyarakat, kepemimpinan kepala sekolah.

Sistem pembiayaan pendidikan menjadi bahan bakar untuk aktivitas operasional satuan pendidikan (Ding, Lu, & Ye, 2020; Kafumbu, 2020). Sistem pembiayaan pendidikan terwujud dalam alokasi komponen biaya, yang idealnya mencerminkan visi dan misi lembaga pendidikan (Mayerle, Rodrigues, Neiva de Figueiredo, & De Genaro Chiroli, 2022). Desentralisasi fiskal, kapasitas fiskal daerah, sumber daya sekolah, otonomi sekolah, dan hasil belajar siswa berada dalam pusaran sistem pembiayaan pendidikan tersebut. Upaya untuk meningkatkan sumber daya pembiayaan yang tersedia untuk sekolah, dapat meningkatkan hasil belajar (Carver Thomas & Darling-Hammond, 2019). Di Indonesia, sistem pembiayaan pendidikan satu dasawarsa terakhir, terutama pasca pemberlakuan otonomi daerah, serangkaian kebijakan pembangunan pendidikan diterapkan seharusnya mengatasi kesenjangan pemerataan pendidikan dan meningkatkan efisiensi manajemen pendidikan (Efriliyanti, Saputra, Tedi, Rini, & Alfianto, 2022). Namun kebijaksanaan pembangunan pendidikan tersebut ternyata belum mampu menanggulangi masalah utama kesenjangan pendidikan disebabkan penekanan berbeda antara asumsi pembangunan pendidikan dan kenyataan kondisi masyarakat (Budiharso & Tarman, 2020). Salah pilih variabel sistem pembiayaan pendidikan memberikan sumbangan terhadap terpuruknya mutu proses dan hasil pendidikan (Han & Ellis, 2019; Tong et al., 2023), oleh karena itu perlu kehati-hatian dalam menentukan alokasinya. Variabel biaya pendidikan biasanya dialokasikan untuk penyelenggaraan pendidikan, gaji/kesejahteraan guru dan pegawai, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan, pembinaan profesional, manajemen sekolah, pengadaan alat-alat pelajaran, pemeliharaan fasilitas pendidikan, dan pembinaan siswa.

Salah satu sumber sistem pembiayaan pendidikan yaitu partisipasi masyarakat, yang berasal dari orang tua, individu yang peduli pendidikan, dunia usaha, dunia industri, dan lain-lainnya (Slicker & Hustedt, 2022). Untuk sekolah dasar negeri memang masih terdapat sumber penerimaan pendidikan lain, yaitu sistem pembiayaan pendidikan dari pemerintah, berbeda dengan swasta yang banyak bergantung pada partisipasi masyarakat. Kedua jenis sekolah tersebut tetap memperoleh Bantuan Operasional Sekolah, dihitung berdasarkan jumlah siswa. Penelitian ini menjadi relevan dilakukan, karena berbagai inefisiensi dan kurang efektifnya sistem pembiayaan pendidikan masih saja terjadi (Fitri, 2020). Bentuk partisipasi masyarakat, memang tidak sekadar pada sistem sistem pembiayaan pendidikan. Tetapi, setiap partisipasi masyarakat dapat dihitung menjadi biaya yang mestinya dikeluarkan oleh sekolah (Coleman, 2019; Gamo & Park, 2022). Berbagai bentuk partisipasi masyarakat antara lain: penelitian dan pengumpulan data, berdialog dengan pembuat kebijakan, manajemen sekolah, desain kurikulum, pengembangan bahan pembelajaran, dan pembangunan sekolah.

Untuk mengelola pembiayaan dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan, peran kepemimpinan kepala sekolah sangat menentukan (Naidoo, 2019). Kepala sekolah yang melakukan perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan semua program pada satuan pendidikan. Peningkatan mutu sekolah dasar merupakan target program pendidikan secara umum (Rostini, Zaeni, Syam, & Achmad, 2022; Shim, 2023). Pendekatan terhadap mutu sekolah ini dapat dilakukan melalui berbagai aspek, misalnya prestasi akademik, olah raga (Martinen, Wilson, Fisher, Beitzel, & Fredrick, 2022), kesenian (Mince & Akshay, 2023), perilaku (Azevedo et al., 2023), karakter (Marmoah & Poerwanti, Suharno, 2022), keagamaan (Azizi, Bakri, Choiriyah, & Kunci, 2023) dan sebagainya. Kepala sekolah sebagai pemimpin pada satuan pendidikan, sekaligus menjalankan fungsi manajemen sekolah, dengan melakukan optimalisasi sumber daya. Sebagai kepala sekolah, tanggung jawab mengelola guru, tenaga pendidikan, dan siswa, sekaligus mediator antara siswa, guru, dan orang tua mereka. Oleh karena itu, sebagai kepala sekolah harapannya menjadi pemimpin yang kuat agar siswa, tenaga pendidikan, dan orang tua menghormati serta mendengarkan apa yang kepala sekolah katakan. Sistem pembiayaan pendidikan,

partisipasi masyarakat, dan kepemimpinan kepala sekolah menjadi variabel-variabel yang menentukan mutu sekolah dasar. Kepemimpinan kepala sekolah memberikan perekat relasional yang menghubungkan dan memperkuat hubungan dengan masyarakat. Menjadikannya dasar dan penting untuk keberhasilan strategi sekolah. Melalui visi, tujuan bersama, dan menciptakan praktik partisipatif untuk mendistribusikan tanggung jawab, sekolah mengoptimalkan peran setiap warga sekolah. Di banyak sekolah, kepemimpinan dan praktik kolaboratif menjadi pendorong untuk sistem pembiayaan pendidikan.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh manajemen pembiayaan pendidikan dan fasilitas pembelajaran terhadap mutu sekolah, dan secara bersama-sama memberikan pengaruh yang kuat dan signifikan (Azhari & Kurniady, 2016). Penelitian lainnya menunjukkan bahwa peran kepala sekolah dan partisipasi masyarakat sangat penting dalam meningkatkan mutu pendidikan (Ballu, Manu, & Meha, 2021; Santika, 2018). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem pembiayaan pendidikan, partisipasi masyarakat, dan kepemimpinan kepala sekolah terhadap mutu sekolah dasar. Penelitian dapat membantu mengidentifikasi masalah sistem manajemen pembiayaan pendidikan, partisipasi masyarakat, kepemimpinan, dan mutu sekolah dasar dan memberikan solusi yang lebih baik. Penelitian juga dapat membantu memahami faktor-faktor yang memengaruhi masalah sistem manajemen pembiayaan pendidikan, partisipasi masyarakat, kepemimpinan, dan mutu sekolah dasar.

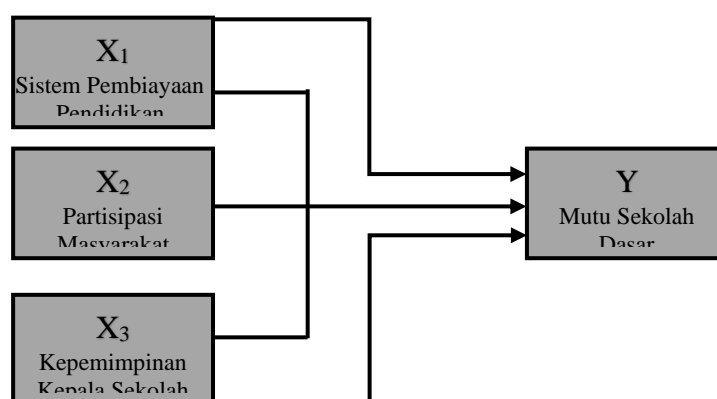
2. METODE

Jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan jenis *ex-post facto* (An & Bauldry, 2023). Subjek penelitian yaitu kepala sekolah. Sampel penelitian diambil secara non probabilitas jenis sampel tepat (Cornesse et al., 2020), pada sekolah dasar dengan kriteria jumlah siswa di atas 400 Kabupaten Sidoarjo, kategori sekolah besar. Berdasarkan kriteria jumlah siswa tersebut, diambil 23 sekolah yang berasal dari 11 kecamatan. Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui langkah berikut. Data diambil menggunakan teknik observasi dengan menilai variabel yang diukur, yang mengekspresikan angka. Instrumen diujicobakan terlebih dahulu sebelum dipergunakan dalam penelitian. Pengujian instrumen tersebut meliputi uji keabsahan dan uji keandalan (McDermott, 2023). Hasil pengujian tersebut diperoleh butir-butir instrumen yang valid dan tidak valid. Instrumen yang tidak valid tidak digunakan dalam penelitian. Pedoman hasil pengukuran dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Pedoman Hasil Pengukuran

Kategori	Formula	Konversi Nilai
Rendah	$X < M - 1SD$	0,00 - 2,00
Sedang	$M - 1SD < X < M + 1SD$	2,01 - 3,00
Tinggi	$M + 1SD < X$	3,01 - 4,00

Keterangan: M = Mean; SD = Standar Deviasi



Gambar 1. Hubungan Variabel Penelitian

Analisis data dilakukan secara deskriptif, melalui penilaian seperti pada Tabel 1. Kemudian dilanjutkan dengan menggunakan uji signifikansi atau uji statistik T dan F (Walters, 2021). Uji T digunakan untuk menunjukkan berapa banyak pengaruh variabel independen secara parsial, terhadap variabel dependen dan uji F untuk mengetahui ada tidak pengaruh simultan (Wechsung & Konietschke, 2023). Selain itu juga dianalisis koefisien determinasinya, variabel bebas terhadap variabel terikat.

Variabel bebasnya terdiri dari sistem pembiayaan pendidikan (X_1), partisipasi masyarakat (X_2), dan kepemimpinan kepala sekolah (X_3). Sementara itu, variabel bebasnya yaitu mutu sekolah dasar (Y). Selanjutnya dilakukan analisis regresi berganda, untuk mencari pengaruh variabel *independent* (variabel bebas atau X) terhadap variabel *dependent* (variabel terikat atau Y). Gambar 1 memperlihatkan hubungan antar variabel penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil pengukuran memperlihatkan variabel pembiayaan dan mutu sekolah masuk dalam kategori tinggi. Sedangkan variabel partisipasi masyarakat dan kepemimpinan dalam kategori sedang. Terdapat variabel partisipasi masyarakat masyarakat dalam kategori rendah, pada dua kecamatan. Tabel 2 memperlihatkan hasil pengukuran tersebut secara terperinci.

Tabel 2. Hasil Pengukuran Deskriptif

Kecamatan	Jumlah Sekolah	Pembiayaan	Partisipasi masyarakat	Kepemimpinan	Mutu Sekolah
Buduran	2	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
Candi	1	Tinggi	Sedang	Sedang	Tinggi
Gedangan	2	Tinggi	Sedang	Sedang	Tinggi
Krian	2	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
Sedati	2	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
Sidoarjo	4	Tinggi	Rendah	Sedang	Sedang
Sukodono	3	Tinggi	Sedang	Tinggi	Sedang
Taman	2	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
Tanggulangun	1	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
Waru	3	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi
Wonoayu	1	Sedang	Sedang	Tinggi	Sedang
Jumlah Total	23	Tinggi	Sedang	Sedang	Tinggi

Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh sistem pembiayaan pendidikan (X_1) terhadap mutu sekolah dasar (Y) pada taraf signifikansi 0.000, partisipasi masyarakat (X_2) terhadap mutu sekolah dasar (Y) pada taraf signifikansi 0.000, dan kepemimpinan kepala sekolah (X_3) terhadap mutu sekolah dasar (Y) pada taraf signifikansi 0.000. Tingkat kepercayaan 95%, α 0.05. Tabel 3 memperlihatkan *coefficients* analisis data penelitian.

Tabel 3. Coefficients Analisis Data Penelitian

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
	B	Std. Error	Beta	
1 (Constant)	0,000	0,000		0,000
X1	0,000	0,000	0,000	0,000
X2	1,000	0,000	1,000	0,000
X3	0,000	0,000	0,000	0,000

Sementara itu, secara simultan terdapat pengaruh sistem pembiayaan pendidikan (X_1), partisipasi masyarakat (X_2), dan kepemimpinan kepala sekolah (X_3) terhadap mutu sekolah dasar (Y) pada taraf signifikansi 0.000. Tabel 4 memperlihatkan anova analisis data penelitian.

Tabel 4. Hasil Analisis Data Penelitian Menggunakan Anova

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	Sig.
1 Regression	7,913	3	2,638	0,000
Residual	0,000	19	0,000	
Total	7,913	22		

Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat pengaruh sistem pembiayaan pendidikan terhadap mutu sekolah dasar. Sistem pembiayaan pendidikan merupakan salah satu variabel yang menyumbang

tercapainya tujuan pendidikan (Laitinen et al., 2023). Pembiayaan menuju sistem pendidikan di Indonesia, proses pembelajaran, dan mutu akademik, menghadapi berbagai masalah utama pendidikan seperti sistem manajemen pembiayaan, hasil akademik yang buruk, kekurangan guru baik di pedesaan maupun perkotaan. Hasil penelitian ini memperlihatkan, sistem pembiayaan pendidikan dapat mempengaruhi mutu sekolah dasar melalui alokasi sumber daya, kualitas guru, fasilitas dan infrastruktur, serta program pelatihan dan pengembangan. Oleh karena itu, penting untuk memiliki sistem pembiayaan pendidikan yang cukup dan efektif untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah dasar. Peningkatan literasi keuangan pengelola sekolah dapat dilaksanakan melalui program-program pendidikan dan pelatihan yang efektif. Biaya pendidikan memengaruhi aspek sosial dan ekonomi, seperti akses kesempatan kerja, kesejahteraan keluarga, mobilitas sosial, dan lain sebagainya (partisipasi masyarakat). Sehingga diperlukan percepatan dan pemerataan penyediaan pendidikan formal secara kuantitatif kerap kesuksesan pembangunan ekonomi segera terwujud. Pemerintah perlu membantu sekolah untuk meningkatkan mutu mereka dengan lebih baik, sebagai prioritas utama dari bidang sistem pembiayaan pendidikan. Memang mencapai mutu pendidikan nasional akan membutuhkan komitmen pembiayaan tambahan selama beberapa tahun mendatang. Memobilisasi sumber daya tambahan untuk pendidikan dan mengatasi akar penyebab ketidakefisienan pengeluaran bukanlah sesuatu yang dapat diselesaikan sendiri oleh sekolah. Pemerintah dan partisipasi masyarakat sangat menentukan sebagai pendukung utamanya. Beberapa penelitian sebelumnya menyatakan bahwa terdapat pengaruh manajemen pembiayaan pendidikan dan fasilitas pembelajaran terhadap mutu sekolah, dan secara bersama-sama memberikan pengaruh yang kuat dan signifikan (Azhari & Kurniady, 2016).

Pengaruh sistem pembiayaan pendidikan terhadap mutu sekolah dasar, dapat ditemukan pada beberapa variabel. Di antara variabel tersebut yaitu ketercapaian tujuan pendidikan, menghasilkan output yang tinggi (Boeren, 2019), proses pembelajaran (Kim et al., 2022; Parrado-Martínez & Sánchez-Andújar, 2020), dan mutu akademik. Selain itu, ditemukan pada variabel kekurangan guru, pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan di daerah pedesaan (Phan, Sun, Zhou, Beg, & Ramsawak, 2023; Plessis & Mestry, 2019), kesempatan akan pendidikan di sekolah dasar (Mangrum, 2022; Tchamyu, 2018), dampak sosial-ekonomi pendidikan, bersinggungan dengan keterlibatan daerah (Ludvigsson, 2020; Lv, Bian, Lee, & He, 2021), dan percepatan serta pemerataan penyediaan pendidikan formal (Chataika, 2023; Smolentseva, 2020). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh partisipasi masyarakat terhadap mutu sekolah dasar. Sejalan dengan itu, pendorong utama perubahan mutu pendidikan yaitu pada intervensi pengelolaan masyarakat dan partisipatif *bottom-up* dan *top-down*, yang beroperasi melalui reformasi desentralisasi, difusi pengetahuan, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sistem pendidikan. Partisipasi masyarakat adalah sebuah konsep yang mencoba untuk menyatukan pemangku kepentingan yang berbeda untuk pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Partisipasi masyarakat dianggap perlu untuk mendapatkan dukungan masyarakat bagi perencanaan dan pengembangan pendidikan (Maujud, 2017; Pratiwi & Meirinawati, 2019). Masyarakat dapat memainkan berbagai peran dalam penyediaan dan pengelolaan serta pengembangan proses pendidikan dan pembelajaran. Saat ini, fokus utama partisipasi masyarakat dalam pendidikan telah bergeser untuk menemukan cara yang efisien dan efektif, untuk memanfaatkan sumber daya yang ada. Orang tua dan masyarakat dapat bekerja sama dalam arah yang benar untuk meningkatkan tujuan pendidikan. Sumber daya digunakan dengan benar untuk meningkatkan mutu pendidikan. Terlepas dari pentingnya keterlibatan orang tua dan masyarakat, sebagian besar sekolah, kabupaten, masih membutuhkan bantuan dalam mengembangkan program kemitraan sekolah, keluarga, dan masyarakat yang komprehensif. Bantuan dalam mengembangkan program tersebut dapat berupa aspek-aspek dalam keluarga dan hubungan dengan sekolah. Aspek tersebut antara lain pengasuhan, untuk membantu semua keluarga membangun lingkungan rumah yang mendukung pembelajaran anak di sekolah. Aspek kedua yaitu berkomunikasi – untuk merancang bentuk komunikasi sekolah-ke-rumah dan rumah-ke-sekolah yang efektif. Ketiga yaitu aspek sukarela, untuk merekrut dan mengatur bantuan dan dukungan orang tua. Berikutnya yaitu aspek belajar di rumah, untuk memberikan informasi dan gagasan kepada keluarga tentang bagaimana membantu siswa di rumah. Aspek kelima yaitu pengambilan keputusan, untuk menyertakan keluarga dalam keputusan sekolah, untuk memiliki pemimpin dan perwakilan orang tua dalam rapat sekolah. Aspek terakhir yaitu berkolaborasi dengan masyarakat, untuk mengidentifikasi dan mengintegrasikan sumber daya serta layanan dari masyarakat untuk memperkuat program sekolah, praktik keluarga, dan pembelajaran siswa. Kolaborasi sekolah dan masyarakat, dapat menjadi sumber pembiayaan yang berasal dari orang tua siswa. Sumber biaya tersebut dapat berupa infak pengembangan sekolah dan wakaf, sumbangan pengembangan pendidikan, uang POMG, uang komputer, uang kegiatan, uang ekstrakurikuler, serta uang zakat, infak dan sedekah. Salah satu faktor yang memengaruhi biaya pendidikan adanya keterbukaan, partisipasi, akuntabilitas dalam pendidikan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Partisipasi masyarakat di sekolah akan membantu

orang belajar mempelajari keterampilan baru atau menyalurkan kesenangan mereka. Membantu orang untuk membangun dan meningkatkan kepercayaan diri mereka. Partisipasi masyarakat membuka jalan bagi pengembangan diri dan kontribusi. Rasa berkontribusi, misalnya, berpartisipasi dalam kegiatan yang berkontribusi pada masyarakat dan dapat memberi rasa senang dan kebermaknaan (Maujud, 2017; Samsiah, Ibrahim, & Musdalifah, 2018). Manfaat partisipasi masyarakat dapat juga menjadi media untuk mempromosikan rasa memiliki, kesehatan dan kesejahteraan yang lebih baik, memberikan tujuan dan rasa kontribusi, beradaptasi dan mengembangkan keterampilan baru, penerimaan dan pengakuan, meningkatkan jaringan social, meningkatkan dukungan sosial, keterlibatan dalam kegiatan yang dapat bermanfaat bagi masyarakat, peluang untuk menghasilkan pendapatan, dan peningkatan keterampilan dan kehidupan.

Untuk mengelola hubungan sekolah dan masyarakat, dibutuhkan kepemimpinan kepala sekolah yang memiliki kapasitas baik. Kepemimpinan yang mampu menjadi jembatan kepentingan keduanya. Kepala sekolah yang memiliki kepemimpinan efektif bekerja tanpa henti untuk meningkatkan prestasi, berfokus pada kualitas pengajaran. Mereka membantu mendefinisikan dan mempromosikan harapan yang tinggi dari orang tua dan masyarakat. Kepala sekolah jenis ini membuka isolasi guru dan usaha yang terfragmentasi antara siswa, orang tua, dan sekolah. Kepemimpinan kepala sekolah seperti itu, terhubung langsung dengan guru, ruang kelas, orang tua, dan masyarakat (Andrianto, 2020; Wahyudin, 2018). Untuk meningkatkan mutu sekolah, kepemimpinan kepala sekolah berupaya mendorong layanan sekolah sesuai atau melebihi standar yang berlaku. Layanan sekolah sesuai standar dapat dikategorikan menjadi kurikulum dan pembelajaran (kompetensi lulusan, isi, standar proses, dan penilaian), tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan mutu, diperlukan manajemen mutu yang meliputi persiapan, perencanaan, dan pelaksanaan peningkatan mutu, pada semua aspek layanan sekolah sesuai standar secara terus-menerus dan menyeluruh (tidak parsial). Upaya kepemimpinan kepala sekolah untuk meningkatkan mutu sekolah, dapat dilakukan dengan berbagai macam jalan. Kepala sekolah dengan menetapkan ekspektasi yang jelas untuk kinerja tinggi, menetapkan standar yang tinggi, salah satu upaya. Lainnya yaitu kepala sekolah dapat berulang kali mengomunikasikan misi, cara terbaik untuk melakukannya dengan melakukan pengulangan tujuan yang sering, terutama yang melibatkan berbagai metode komunikasi. Mendengarkan umpan balik dari yang berkinerja tinggi lebih dari yang berkinerja rendah, juga patut dilakukan kepala sekolah sebagai pemimpin. Kepala sekolah sebagai pemimpin juga tetap berfokus pada pemecahan masalah alih-alih memikirkannya (Cahyaningrum, 2020; Mulyana Abdullah, 2017).

Perlu dilakukan yaitu nilai hadiah, bukan waktu. Paling mendasar dari kepemimpinan yaitu menerima tanggung jawab dan belajar dari kesalahan. Terakhir, hasil penelitian ini menunjukkan secara simultan terdapat pengaruh sistem pembiayaan pendidikan, partisipasi masyarakat, dan kepemimpinan kepala sekolah terhadap mutu sekolah dasar. Sistem pembiayaan pendidikan yang secara efektif dan efisien, partisipasi masyarakat untuk pemecahan masalah dan pengambilan keputusan, dan kepemimpinan kepala sekolah berupaya mendorong layanan sekolah sesuai atau melebihi standar yang berlaku meningkatkan mutu sekolah dasar. Temuan tersebut sejalan dengan yang disampaikan (Hauseman, Pollock, & Wang, 2017), bahwa kepala sekolah terlibat dalam rata-rata 4,4 peluang partisipasi masyarakat di tingkat sekolah. Hampir dua pertiga kepala sekolah melaporkan bahwa keterlibatan sekolah-masyarakat meningkatkan beban kerja mereka. Sistem pembiayaan pendidikan adalah bidang yang luas dan berkembang yang mencakup tiga fungsi terkait sumber daya menghasilkan pendapatan, alokasi sumber daya, dan pemanfaatan sumber daya semuanya ditujukan untuk memberikan kesempatan pendidikan dan menghasilkan mutu pendidikan (Rice, Monk, & Zhang, 2020). Sistem pembiayaan pendidikan, partisipasi masyarakat, kepemimpinan kepala sekolah, dan mutu sekolah dasar dengan alasan yang berbeda dapat menjadi pendorong mencapai tujuan pendidikan. Mutu sekolah yang baik tidak bisa dilepaskan dari kemungkinan tercapainya tujuan pendidikan, yang didukung oleh pembiayaan, partisipasi masyarakat, kepemimpinan kepala sekolah. Tujuan Pendidikan tolok ukurnya berupa Mutu sekolah, yang merupakan proses pematangan mutu siswa melalui proses pembelajaran untuk bebas dari ketidaktahuan, ketidakmampuan, ketidakberdayaan, ketidakbenaran, ketidakjujuran, dan dari buruknya akhlaq dan keimanan. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh manajemen pembiayaan pendidikan dan fasilitas pembelajaran terhadap mutu sekolah, dan secara bersama-sama memberikan pengaruh yang kuat dan signifikan (Azhari & Kurniady, 2016). Penelitian lainnya menunjukkan bahwa peran kepala sekolah dan partisipasi masyarakat sangat penting dalam meningkatkan mutu pendidikan (Ballu et al., 2021; Santika, 2018). Implikasinya, pembiayaan menuju sistem pendidikan yang baik, masalah utama pendidikan seperti sistem manajemen pembiayaan, hasil akademik yang buruk, kekurangan guru baik di pedesaan maupun perkotaan, perlu dikelola dengan baik. Peningkatan biaya-manfaat untuk mengimbangi biaya pembangunan. Perlu peningkatan pengetahuan keuangan masyarakat. Tanpa tingkat pengetahuan keuangan tertentu, pengguna pendidikan

dapat menghadapi kesulitan dalam membuat keputusan yang tepat untuk ikut berpartisipasi dalam pendidikan. Pertimbangan peran program bantuan pemerintah pusat penting dalam sistem pembiayaan pendidikan, karena kebijakan dan praktik keuangan negara dan sekolah bersinggungan dengan keterlibatan daerah. Partisipasi masyarakat dianggap perlu untuk mendapatkan dukungan masyarakat bagi perencanaan dan pengembangan pendidikan. Masyarakat dapat memainkan berbagai peran dalam penyediaan dan pengelolaan serta pengembangan proses pendidikan dan pembelajaran.

4. SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan terdapat pengaruh sistem pembiayaan pendidikan, partisipasi masyarakat, dan kepemimpinan kepala sekolah terhadap mutu sekolah dasar. Partisipasi masyarakat dianggap perlu untuk mendapatkan dukungan masyarakat bagi mengelola variabel biaya pendidikan, terutama aspek perencanaan dan pengembangan pendidikan. Kolaborasi sekolah dan masyarakat, dapat menjadi sumber pembiayaan yang berasal dari orang tua siswa. Untuk meningkatkan mutu sekolah, kepemimpinan kepala sekolah berupaya mendorong layanan sekolah sesuai atau melebihi standar yang berlaku. Layanan sekolah sesuai standar dapat dikategorikan menjadi kurikulum dan pembelajaran (kompetensi lulusan, isi, standar proses, dan penilaian), tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Dekan, Ketua Departemen Administrasi Pendidikan, Ketua Departemen PGSD, Ketua Departemen PGPAUD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, yang memberikan dukungan moral dan material untuk melakukan penelitian dengan sangat memadai.

6. DAFTAR PUSTAKA

- An, W., & Bauldry, S. (2023). Methodological advances in quantitative social science: In celebration of the Social Science Research 50th anniversary. *Social Science Research*, 110(102843). <https://doi.org/10.1016/J.SSRESEARCH.2022.102843>.
- Andrianto. (2020). Peran Kepala Sekolah Dalam Implementasi Manajemen Mutu Peserta Didik (SMK Darul Maghfiroh Di Sinar Rejeki, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan). *Al-Fahim; Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2(2), 39–55. <https://doi.org/10.54396/alfahim.v2i2.90>.
- Azevedo, R., Rosário, P., Núñez, J. C., Vallejo, G., Fuentes, S., & Magalhães, P. (2023). A school-based intervention on elementary students' school engagement. *Contemporary Educational Psychology*, 73(102148). <https://doi.org/10.1016/J.CEDPSYCH.2023.102148>.
- Azhari, U. L., & Kurniady, D. A. (2016). Manajemen Pembiayaan Pendidikan, Fasilitas Pembelajaran, dan Mutu Sekolah. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 13(2). <https://doi.org/10.17509/JAP.V23I2.5631>.
- Azizi, M. H., Bakri, S., Choiriyah, S., & Kunci, K. (2023). Implementation of Total Quality Management in the Ministry of Religion-Based Education. *Nidhomul Haq : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 8(1), 125–136. <https://doi.org/10.31538/NDH.V8I1.3067>.
- Ballu, S. S., Manu, L., & Meha, A. M. (2021). Analisis Peran Supervisi Akademik Kepala Sekolah Kepada Guru IPA DI SMP Negeri 20 Kupang. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(1). <https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i1.161>.
- Boeren, E. (2019). Understanding Sustainable Development Goal (SDG) 4 on “quality education” from micro, meso and macro perspectives. *International Review of Education*, 65(2), 277–294. <https://doi.org/10.1007/S11159-019-09772-7>.
- Budiharso, T., & Tarman, B. (2020). Improving Quality Education through Better Working Conditions of Academic Institutes. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 7(1), 99–115. <https://doi.org/10.29333/EJCS/306>.
- Cahyaningrum, R. (2020). Kontribusi Kemampuan Manajerial Kepala Sekolah, Motivasi Guru, dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Guru Sekolah Dasar. *Media Manajemen Pendidikan*, 3(1), 100. <https://doi.org/10.30738/mmp.v3i1.4633>.
- Carver Thomas, D., & Darling-Hammond, L. (2019). The trouble with teacher turnover: how teacher attrition affects students and schools. *Archivos Analíticos de Políticas Educativas. Education Policy Analysis Archives*, 27(1), 114. Retrieved from <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7434614&info=resumen&idioma=ENG>.
- Chataika, T. (2023). Inclusive education policies and practices in Malawi and Zimbabwe. *International Encyclopedia of Education (Fourth Edition)*, 404–417. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12->

- 818630-5.12033-0.
- Coleman, J. S. (2019). Family involvement in education. *School, Family, and Community Interaction: A View From The Firing Lines*, 23–27. <https://doi.org/10.4324/9780429305375-3/Family-Involvement-Education-James-Coleman>.
- Cornesse, C., Blom, A. G., Dutwin, D., Krosnick, J. A., De Leeuw, E. D., Legleye, S., ... Wenz, A. (2020). A Review of Conceptual Approaches and Empirical Evidence on Probability and Nonprobability Sample Survey Research. *Journal of Survey Statistics and Methodology*, 8(1), 4–36. <https://doi.org/10.1093/JSSAM/SMZ041>.
- Ding, Y., Lu, F., & Ye, X. (2020). Intergovernmental transfer under heterogeneous accountabilities: The effects of the 2006 Chinese Education Finance. *Economics of Education Review*, 77(101985). <https://doi.org/10.1016/J.ECONEDUREV.2020.101985>.
- Efriliyanti, L., Saputra, A. A., Tedi, E., Rini, P., & Alfianto, A. (2022). Educational Financing Management in the Era of Regional Autonomy. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 11930–11936. <https://doi.org/10.31004/JPDK.V4I6.10340>.
- Fitri, A. (2020). Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi. *Jurnal Bahana Manajemen Pendidikan*, 2(1), 33–39. <https://doi.org/10.24036/BMP.V2I1.3753>.
- Gamo, B. R., & Park, D. B. (2022). Community capacity influencing community participation: Evidence from Ethiopia. *World Development Perspectives*, 27(100448). <https://doi.org/10.1016/J.WDP.2022.100448>.
- Han, F., & Ellis, R. A. (2019). Identifying consistent patterns of quality learning discussions in blended learning. *The Internet and Higher Education*, 40, 12–19. <https://doi.org/10.1016/J.IHEDUC.2018.09.002>.
- Hauseman, D. C., Pollock, K., & Wang, F. (2017). Inconvenient, but Essential: Impact and Influence of School-Community Involvement on Principals' Work and Workload. *School Community Journal*, 27(1), 83–105. Retrieved from <http://www.schoolcommunitynetwork.org/SCJ.aspx>.
- Kafumbu, F. T. (2020). An analytical report on the status of financing of secondary education in Malawi. *International Journal of Educational Development*, 72, 102127. <https://doi.org/10.1016/J.IJEDUDEV.2019.102127>.
- Kim, J., Robinson, N., Härmä, J., Jeffery, D., Rose, P., & Woldehanna, T. (2022). Misalignment of policy priorities and financing for early childhood education: Evidence from Ethiopia, Liberia, and Mainland Tanzania. *International Journal of Educational Research*, 111, 10189. <https://doi.org/10.1016/J.IJER.2021.101891>.
- Laitinen, A. L., Antikainen, A., Mikkonen, S., Kähkönen, K., Talvia, S., Varjonen, S., ... Tilles-Tirkkonen, T. (2023). The 'Tasty School' model is feasible for food education in primary schools. *Journal of Human Nutrition and Dietetics*, 36(1), 75–85. <https://doi.org/10.1111/JHN.13071>.
- Ludvigsson, J. F. (2020). The first eight months of Sweden's COVID-19 strategy and the key actions and actors that were involved. *Acta Paediatrica*, 109(2), 2459–2471. <https://doi.org/10.1111/APA.15582>.
- Lv, C., Bian, B., Lee, C. C., & He, Z. (2021). Regional gap and the trend of green finance development in China. *Energy Economics*, 102, 10547. <https://doi.org/10.1016/J.ENERCO.2021.105476>.
- Mangrum, D. (2022). Personal finance education mandates and student loan repayment. *Journal of Financial Economics*, 146(1), 1–26. <https://doi.org/10.1016/J.JFINECO.2022.06.006>.
- Marmoah, S., & Poerwanti, Suharno, J. I. S. (2022). Literacy culture management of elementary school in Indonesia. *Heliyon*, 8(4). <https://doi.org/10.1016/J.HELİYON.2022.E09315>.
- Marttinen, R., Wilson, K., Fisher, K., Beitzel, M., & Fredrick, R. N. (2022). Process evaluation and challenges in collecting data from an after-school sports and literacy program in a diverse, low-income community. *Evaluation and Program Planning*, 91, 102052. <https://doi.org/10.1016/J.EVALPROGPLAN.2022.102052>.
- Maujud, F. (2017). Peran Partisipasi Masyarakat dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Madrasah (Studi Kasus di Madrasah Ibtidaiyah Islahul Muta'allim Pagutan Kota Mataram). *Palapa*, 5(2), 92–121. <https://doi.org/10.36088/palapa.v5i2.48>.
- Mayerle, S. F., Rodrigues, H. F., Neiva de Figueiredo, J., & De Genaro Chiroli, D. M. (2022). Optimal student/school/class/teacher/classroom matching to support efficient public school system resource allocation. *Socio-Economic Planning Sciences*, 83, 101341. <https://doi.org/10.1016/J.SEPS.2022.101341>.
- McDermott, R. (2023). On the scientific study of small samples: Challenges confronting quantitative and qualitative methodologies. *The Leadership Quarterly*, 101675. <https://doi.org/10.1016/J.LEAQUA.2023.101675>.

- Minces, V. H., & Akshay, N. (2023). STEAM for all: a vision for STEM and arts integration. *International Encyclopedia of Education (Fourth Edition)*, 10–18. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-818630-5.13053-2>.
- Mulyana Abdullah. (2017). Manajemen Mutu Pendidikan Di Sekolah Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah, Profesionalisme Guru, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Di Sekolah. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 17(3). <https://doi.org/10.17509/jpp.v17i3.9612>.
- Naidoo, P. (2019). Perceptions of teachers and school management teams of the leadership roles of public school principals. *South African Journal of Education*, 39(2). <https://doi.org/10.4314/saje.v39i2>.
- Parrado-Martínez, P., & Sánchez-Andújar, S. (2020). Development of competences in postgraduate studies of finance: A project-based learning (PBL) case study. *International Review of Economics Education*, 35, 100192. <https://doi.org/10.1016/J.IREE.2020.100192>.
- Phan, C. T., Sun, S., Zhou, Z. Y., Beg, R., & Ramsawak, R. (2023). Does productive microcredit improve rural children's education? Evidence from rural Vietnam. *Journal of Asian Economics*, 84, 101555. <https://doi.org/10.1016/J.ASIECO.2022.101555>.
- Plessis, P. du, & Mestry, R. (2019). Teachers for rural schools – a challenge for South Africa. *South African Journal of Education*, 39(4). <https://doi.org/10.4314/saje.v39i4>.
- Pratiwi, D. I., & Meirinawati. (2019). Partisipasi Masyarakat dalam Program Desa Tangguh Bencana (Destana) di Desa Pilangsari Kabupaten Bojonegoro. *Publika*, 7(7). Retrieved from <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/27/article/view/29557>.
- Rice, J. K., Monk, D., & Zhang, J. (2020). School finance: an overview. *The Economics of Education: A Comprehensive Overview*, 333–344. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-815391-8.00024-0>.
- Rodríguez, J. V., Rodado, D. N., Crissien Borrero, T., & Parody, A. (2022). Multidimensional indicator to measure quality in education. *International Journal of Educational Development*, 89, 102541. <https://doi.org/10.1016/J.IJEDUDEV.2021.102541>.
- Rostini, D., Zaeni, R., Syam, A., & Achmad, W. (2022). The Significance of Principal Management on Teacher Performance and Quality of Learning. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 14(2), 2513–2520. <https://doi.org/10.35445/ALISHLAH.V14I2.1721>.
- Samsiah, Ibrahim, M. M., & Musdalifah. (2018). Partisipasi Masyarakat dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Maroanging Kabupaten Bulukumba. *El-Idare: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(2), 171–181. <https://doi.org/10.19109/elidare.v4i2.3646>.
- Santika, T. (2018). Peran Keluarga, Guru Dan Masyarakat Dalam Pembentukan Karakter Anak Usia Dini. *JUDIKA (Jurnal Pendidikan UNSIKA)*, 6(November).
- Shim, J. (2023). Investigating the effectiveness of introducing virtual reality to elementary school students' moral education. *Computers & Education: X Reality*, 2, 100010. <https://doi.org/10.1016/J.CEXR.2023.100010>.
- Slicker, G., & Hustedt, J. T. (2022). Predicting participation in the child care subsidy system from provider features, community characteristics, and use of funding streams. *Children and Youth Services Review*, 136, 106392. <https://doi.org/10.1016/J.CHILDYOUTH.2022.106392>.
- Smolentseva, A. (2020). Marketisation of higher education and dual-track tuition fee system in post-Soviet countries. *International Journal of Educational Development*, 78, 102265. <https://doi.org/10.1016/J.IJEDUDEV.2020.102265>.
- Tchamyou, V. S. (2018). Education, lifelong learning, inequality and financial access: evidence from African countries., 15(1), 7–25. <https://doi.org/10.1080/21582041.2018.1433314>.
- Tong, F., Irby, B. J., Lara-Alecio, R., Guerrero, C., Tang, S., Sutton-Jones, K. L., & Ross, S. M. (2023). Designing and evaluating complex educational research to meet federal grant requirement: A demonstration of a funded large-scale protocol. . *Evaluation and Program Planning*, 97, 102262. <https://doi.org/10.1016/J.EVALPROGPLAN.2023.102262>.
- Wahyudin, W. (2018). Optimalisasi Peran Kepala Sekolah dalam Implementasi Kurikulum 2013. *Jurnal Kependidikan*, 6(2), 249–265. <https://doi.org/10.24090/jk.v6i2.1932>.
- Walters, W. H. (2021). Survey design, sampling, and significance testing: Key issues. *The Journal of Academic Librarianship*, 47(3), 102344. <https://doi.org/10.1016/J.ACALIB.2021.102344>.
- Wechsung, M., & Konietzschke, F. (2023). Simultaneous inference for partial areas under receiver operating curves—With a view towards efficiency. , 226., *Journal of Statistical Planning and Inference*, 226, 71–85. <https://doi.org/10.1016/J.JSPI.2023.02.002>.